

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu contohnya adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan aset negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengharuskan pemerintah untuk dapat membuat kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai pengelolaan barang milik daerah. Barang Milik Daerah (BMD) didapatkan dari berbagai sumber digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah, pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. BMD merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan juga harus dikelola secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dipertanggungjawabkan.

Aset tetap atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai asset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (BPK RI, 2010).

Barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah sering kali terdapat berbagai persoalan aset

daerah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset tetap pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset tetap sehingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset tetap. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk didalamnya 1) Adanya kelemahan sistem pengendalian intern; 2) Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib; 3) Tidak sesuai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan umum yang terjadi dalam pengelolaan barang milik daerah adalah ketidak tertiban didalam pelaksanaan inventarisasi atau pengelolaan data. Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola cenderung tidak teradministrasi secara optimal seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan yang akan mengakibatkan hilangnya aset dari pemerintah daerah. Berikut opini yang diberikan BPK terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok :

Tabel 1. Opini BPK Terhadap LKPD Kota Solok

LKPD Tahun	Opini
2012	WTP (paragraf penjas terkait asset)
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP

Sumber: diolah

LKPD Kota Solok tahun 2012 mendapatkan opini WTP dengan paragraf penjas terkait pengelolaan BMD. Akan tetapi opini terhadap LKPD tahun 2013, 2014 dan 2015 turun menjadi WDP. Salah satu penyebab turunnya opini terhadap LKPD Kota Solok ini adalah temuan yang terkait pengelolaan barang milik daerah. Kondisi pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Solok yang dilakukan oleh Pengelola BMD, Pembantu Pengelola BMD, Pengguna BMD, Kuasa Pengguna BMD, Pengurus Barang belum tertata sesuai dengan aturan yang ada sehingga

perlu penanganan dan penataan yang serius dan sungguh-sungguh oleh pemangku kepentingan.

Menurut Prahara (2014) dalam penelitiannya Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Bandung menemukan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh Opini WDP pada umumnya telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan. Dalam penelitiannya Prahara (2014) menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini sejalan dengan yang disimpulkan oleh Detisa (2008) bahwa 41,3% kualitas laporan keuangan ditentukan oleh pengelolaan BMD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPIP diselenggarakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ditaatinya peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang termasuk didalamnya barang milik daerah atau asset tetap, yang dapat dilihat melalui opini BPK yang didapatkan. Hamidah (2014) dalam tulisannya menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pengelolaan barang milik

negara berpengaruh signifikan positif terhadap pengamanan aset negara. Dalam rangka meningkatkan opini dan akuntabilitas laporan keuangan serta mengamankan barang milik daerah, diperlukan adanya sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik daerah yang baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Solok".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Solok telah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan?
2. Apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap barang milik daerah pada Pemerintah Kota Solok telah efektif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Solok telah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan yang ada.
2. Untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap barang milik daerah pada Pemerintah Kota Solok telah efektif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Solok, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang berguna menambah pengetahuan dan wawasan terhadap Sistem

Pengendalian Internal Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis, merupakan sebuah wahana dalam menambah ilmu dan wawasan tentang Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab yaitu :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan landasan teoritis, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, skala pengukuran dan metode analisis data.

Bab empat menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi dan implikasi.

Bab lima sebagai bab penutup, yang akan memuat kesimpulan akhir dari penelitian serta saran-saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

